

# **MASA DEPAN KEBINEKAAN INDONESIA**

**Prof. Dr. S. Budhisantosa  
Guru Besar Antropologi (Emeritus)  
Universitas Indonesia**



**KOENTJARANINGRAT  
MEMORIAL LECTURE XIV/2017**

**Auditorium Pusat Studi Jepang, Kampus UI Depok  
Sabtu, 16 September 2017, 10:00 - 12:00 WIB**

**SEKAPUR SIRIH**  
**KETUA FORUM KAJIAN ANTROPOLOGI INDONESIA DAN**  
**KETUA PELAKSANA HOMECOMING 60 TAHUN ANTROPOLOGI**  
**UNIVERSITAS INDONESIA**

Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan Saudara-saudara sekalian, selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya dalam acara ini, kuliah Koentjaraningrat atau yang lebih sering disebut Koentjaraningrat Memorial Lecture atau KML. Acara ini merupakan mata acara pembuka dari rangkaian acara yang akan digelar dalam rangka acara Homecoming 60 Tahun Antropologi Universitas Indonesia

Koentjaraningrat Memorial Lecture adalah kegiatan kuliah umum tahunan dari Forum Kajian Antropologi (FKAI), yayasan yang bertujuan mempromosikan dan mengembangkan antropologi di luar dunia perguruan tinggi. Acara kuliah dan diskusi ini diselenggarakan untuk menghormati dan mengenang jasa-jasa almarhum Prof. Koentjaraningrat, Bapak Antropologi Indonesia.

Kuliah umum ini telah diselenggarakan sejak 13 tahun lalu, tahun 2004. Sejak saat itu, acara ini nyaris tak pernah absen dilaksanakan. Hanya pada tahun 2016, karena berbagai alasan, KML tak sempat diselenggarakan. Namun, "utang" tersebut segera dibayar. KML ke-XIV ini adalah yang kedua di tahun 2017 ini. Sebelumnya, KML ke-XIII sudah digelar pada awal tahun ini di Museum Nasional.

\*\*\*\*\*

Sikap menghormati keberagaman dan toleran pada perbedaan tampaknya sudah menjadi naluri dasar dan inklinasi universal para antropolog. Kesepakatan di antara para pendiri bangsa ini untuk bersama-sama mewujudkan Indonesia yang bersatu dalam keberagaman, yang tercermin dalam semboyan nasional Bhinneka Tunggal Ika, makin menguatkan keyakinan bahwa sudah menjadi takdirnya Indonesia adalah sebuah bangsa yang majemuk, heterogen, plural; dan adalah tugas para antropolog untuk ikut merawat dan menjaga persatuan dan kesatuannya.

Oleh karena itu, tak heran jika para antropolog Indonesia langsung merasa terusik ketika di penghujung tahun 2016 lalu dinamika sosial-politik di

Jakarta, ibu kota negara, berkembang ke arah yang berseberangan dari semangat keberagaman. Munculnya fenomena politik identitas, dimana isu-isu SARA digunakan dalam kampanye untuk memenangi kontestasi politik, telah merebakkan sikap intoleran, sektarian, dan anti-perbedaan ke berbagai lapisan masyarakat dan secara horizontal ke berbagai daerah, yang segera memunculkan kekhawatiran publik terhadap kemungkinan bakal terbelahnya bangsa ini.

Pada pertengahan Desember 2016, lebih dari 300 antropolog yang tergabung dalam gerakan Antropologi untuk Indonesia menandatangani dokumen seruan Darurat Kebinekaan, semacam petisi yang isinya meminta Pemerintah agar segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah kian berkembangnya politik identitas dan mengeliminasi sikap intoleran. Petisi inilah yang sekitar sebulan kemudian membawa 10 orang wakil para antropolog se-Indonesia ke Istana Negara untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada Presiden RI.

Dalam rangka merespons fenomena sosial-politik di atas itu sengaja dipilih "Kemajemukan dan Keadilan" sebagai tema KML terdahulu, awal Februari lalu. KML kali ini dimaksudkan sebagai lanjutan dari kuliah umum tersebut. Hari ini Prof Budhisantosa akan menyampaikan makalah berjudul "Masa Depan Kebinekaan Indonesia", dimana beliau nanti akan melakukan semacam penerawangan ke masa lalu, membicarakan masalah-masalah kemajemukan bangsa dalam prerspektif sejarah, dan kemudian menerawang ke masa depan, mendiskusikan persoalan-persoalan kemajemukan yang masih tersisa dan langkah-langkah apa yang perlu diambil untuk menjaga dan melestarikan kebhinnekaan tunggal ika kita.

\*\*\*\*\*

KML ke-XIV ini bukan KML biasa. Kali ini, kuliah umum ini diselenggarakan dalam rangka perayaan 60 tahun antropologi Indonesia sekaligus 60 tahun Jurusan/Departemen Antropologi Universitas Indonesia. KML kali ini digelar sebagai bagian dari acara Homecoming, reuni akbar alumni Jurusan/Departemen Antropologi Universitas Indonesia, yang melibatkan para alumni generasi zaman kampus Rawamangun, tepatnya di FSUI (kini FIB UI), rumah pertama Jurusan Antropologi, hingga generasi mereka yang baru berkuliah dan menjadi sarjana di Departemen Antropologi FISIP UI di kampus Depok ini.

Kuliah Koentjaraningrat kali ini juga luar biasa karena diselenggarakan FKAI bersama institusi-institusi dan organisasi-organisasi antropologi lain, yakni Departemen Antropologi FISIP UI, Asosiasi Antropologi Indonesia (AAI), Ikatan Kekerabatan Antropologi UI (IKA UI) dan Himpunan Mahasiswa Antropologi UI (HeMan-UI).

Kepada segenap “kerabat” dari Departemen Antropologi, AAI, IKA UI, dan para ananda dari HeMan UI, ingin saya menghaturkan terima kasih yang tak terhingga. Tanpa dukungan Anda semua, yang telah bekerjasama dengan baik dalam satu kepanitiaan yang sama, acara ini mungkin tak akan pernah terlaksana.

Ucapan Terima kasih juga wajib dihaturkan kepada para sponsor dan donatur yang ikut mendukung pelaksanaan acara Homecoming 60 Tahun Antropologi UI, termasuk acara kuliah umum ini. Mereka adalah Yayasan Sjahrir dan Bank BTN; ditambah dengan Bapak Franciscus Welirang dan Indofood yang telah ikut menjamin tersedianya hidangan sarapan kita pagi ini. Selain itu Bapak Theo Gazali yang selalu ikut menyumbang produk Dua Kelinci.

Sejumlah alumni supersenior juga telah mengalirkan bantuan yang tak kalah berarti dalam berbagai bentuk, mulai dari dana, gagasan, sampai doa. Kepada mereka, yang rasanya tak perlu disebut nama-namanya di sini, saya pun mengucapkan terima kasih, matur suwun, matur suksme, hatur nuhun, mauiate godang.

Dalam kesempatan ini, izinkanlah saya sekalian memohon maaf jika ada tindakan atau kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak-bapak/Ibu-ibu/Saudara-saudara sekalian.

Terakhir, meski sebagian dari kita yang hadir di sini mungkin tak lagi beminat menjadi mahasiswa atau cendekiawan pembelajar, saya tetap mengucapkan selamat berkuliah dan berdiskusi. Demi masa depan Indonesia yang lebih baik!

Depok, Sabtu, 16 September 2017

Mulyawan Karim

## MASA DEPAN KEBINEKAAN INDONESIA

Semangat perjuangan untuk membebaskan diri dari kekuasaan kolonial telah berhasil mempersatukan penduduk kepulauan Nusantara menjadi satu bangsa dan mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang di proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Keberhasilan perjuangan itu dilengkapi dengan penyusunan Undang-undang Dasar 1945, lengkap dengan landasan filosofi Pancasila.

Kesepakatan politik bersama untuk membangun satu bangsa besar yang meliputi berbagai kelompok sosial-budaya yang beragam (pluralistik) dan tersebar di kepulauan Nusantara itu mempunyai implikasi sosial budaya harus diatasi. Untuk mengatasi tantangan yang mungkin timbul karena keberagaman masyarakat bangsa Indonesia yang baru lahir, keberadaan dan kelangsungan hidup kelompok sosial dan pendukung kebudayaan yang beragam itu dihormati dalam kerangka Kebhinnekaan tunggal ika bangsa Indonesia. Penghormatan terhadap Kebhinnekaan tunggal ika yang ditanamkan dan dikukuhkan melalui proses sosialisasi sejak dini itu akhirnya tumbuh menjadi identitas bangsa (*national identity*) yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa-bangsa lain.

### **Integrasi Nasional**

Walaupun secara yuridis formal, dengan pernyataan kemerdekaan dan pengesahan UUD, integrasi nasional telah berlangsung, namun proses adaptasi sosial-politik di kalangan masyarakat Indonesia yang heterogen itu masih berlangsung dengan berbagai kendalanya. Betapa sulitnya mempersatukan masyarakat di kepulauan Nusantara dengan berbagai latar belakang sosial-budaya, kesukuan, ras, dan keagamaan menjadi satu bangsa yang besar tercermin dalam kurun waktu yang ditempuhnya. Selama 25 tahun mendiang presiden Sukarno menghabiskan waktunya untuk membina persatuan dan kesatuan bangsa. Pergolakan sosial politik dalam proses adaptasi dan akomodasi kebudayaan secara nasional masih terus berlangsung di berbagai daerah. Sementara itu rongrongan kekuatan asing yang berusaha untuk menggagalkan integrasi nasional tidak mungkin

diabaikan. Betapa dahsyatnya pergolakan sosial-politik yang sebagian disertai kekerasan bersenjata, tercermin dalam judul pengamatan antropologis yang digunakan oleh sarjana antropologi Amerika, (Clifford Geertz, 1937), yaitu *Integrative Revolution*.

Walaupun niat segenap penduduk kepulauan Nusantara yang terdiri dari berbagai kelompok kesukuan, kedaerahan, kebudayaan, serta rasial untuk membangun satu bangsa itu telah diikrarkan sejak 1928, namun pelaksanaannya tidaklah mudah. Kelompok-kelompok sosial yang semula hidup secara mandiri dan didominasi oleh kebudayaan lokal, harus lebih intensif memperluas jaringan sosial jauh ke luar lingkungan masing-masing secara nasional. Kenyataan tersebut menimbulkan kebutuhan akan pengembangan pranata sosial dan perangkat nilai budaya dengan pedoman dan kerangka acuan bersama.

Pengembangan kebudayaan nasional sebagai kebutuhan bangsa yang baru lahir itu telah memacu proses akulturasi dengan pinjam meminjam atau tukar menukar unsur kebudayaan " daerah " dan tidak sedikit unsur kebudayaan asing yang harus diambil alih untuk mempercepat dan memperkaya kebudayaan nasional. Walaupun masyarakat Indonesia memerlukan pengembangan kebudayaan bangsa secara cepat untuk memenuhi kerangka acuan bersama, pada kenyataannya proses akulturasi itu telah menimbulkan berbagai keresahan.

Gejolak sosial-politik di dalam negeri terus berlanjut dalam proses adaptasi social-budaya kelompok-kelompok sosial yang beranekaragam mempersatukan diri sebagai satu bangsa yang besar. Upaya Pemerintah untuk menegakkan kemerdekaan dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan, ternyata telah menimbulkan kejutan budaya atau *culture shock* pada sementara masyarakat, terutama mereka yang sejak semula tidak banyak terlibat dalam interaksi lintas-lingkungan sosial yang lebih luas. Pengembangan administrasi pemerintahan nasional dan pemberlakuan peraturan dan perundangan yang melintasi batas lingkungan kesukubangsaan dan kedaerahan menimbulkan implikasi sosial-budaya yang jauh lebih kompleks dari sekedar mencapai kesepakatan politik yang teruang dalam UUD 1945 beserta mukadimahnyanya. Keberagaman latar belakang sosial-budaya, kesukuan, kedaerahan, rasial, serta agama

merupakan faktor yang menuntut perhatian dan kebijaksanaan secara lebih cermat.

Dalam masyarakat luas, perluasan administrasi pemerintahan, misalnya, telah menimbulkan reaksi pro dan kontra, terutama yang menyangkut bentuk negara kesatuan atau federal. Kedua pilihan itu bukan hanya menyangkut kepentingan politik masing-masing kelompok sosial komponen bangsa yang baru lahir, tetapi juga menyangkut keberadaan dan hari depan kebudayaan daerah. Ada kekhawatiran sementara pihak atas kelangsungan hidup dan hari depan kebudayaan-kebudayaan daerah walaupun secara khusus telah mendapatkan pengakuan dalam UUD 1945.

Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada 1928 untuk menjunjung tinggi "bahasa persatuan" yang bermakna luas sebagai kebudayaan diartikan dan salah ucapkan sebagai "berbahasa satu bahasa Indonesia" yang seolah olah meniadakan bahasa-bahasa yang mewakili aneka kebudayaan daerah tidak ada tempat dalam pembinaan kebudayaan nasional. Kekhawatiran masyarakat di daerah bisa dimengerti mengingat pengalaman di masa pemerintahan militer Jepang yang memaksakan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di seluruh wilayah bekas jajahan Belanda untuk mengukuhkan kekuasaannya.

Kekhawatiran masyarakat Indonesia akan hari depan kebudayaan daerah juga muncul karena dalam menggalang persatuan dan kesatuan bangsa di awal kemerdekaan, pemerintah terpaksa mengutamakan pengembangan unsur kebudayaan yang luas persebarannya karena sifat kemiripannya sebagai *common denominator* yang dapat memperkuat ikatan. Keresahan itu tercermin dalam reaksi masyarakat yang mempermasalahkan banyaknya unsur kebudayaan dan kosakata dari bahasa Jawa yang tersebar luas terbawa oleh pendukungnya. Bahkan, di beberapa daerah, kebudayaan Jawa menjadi *dominant culture* yang menjembatani pergaulan penduduk lintas kelompok etnik dan kedaerahan.

Dominasi kebudayaan Jawa bertambah besar dengan banyaknya kausakata yang digunakan oleh pemimpin bangsa yang ingin menunjukkan keakraban dengan mengadopsi kausa kata Jawa. Akan tetapi, dengan meningkatnya intensitas interaksi sosial secara nasional, sumbangan kebudayaan daerah dalam pengembangan kebudayaan nasional semakin besar sehingga

mempercepat perkembangan kebudayaan “nasional” berfungsi sebagai sarana pengikat persatuan dan kesatuan bangsa.

### **Akulturasasi dalam Masyarakat yang Beragam**

Gejala sosial pada masa revolusi integrasi itu menunjukkan akan adanya percepatan akulturasasi yang memancing reaksi pro dan kontra dalam proses adaptasi dan akomodasinya. Sesungguhnya, sebagai makhluk yang tertinggi derajatnya di muka bumi, manusia senantiasa berusaha menyesuaikan diri secara aktif terhadap lingkungan hidupnya. Sebaliknya lingkungan hidup manusia senantiasa akan mengalami perubahan akibat ulah manusia. Hubungan timbal balik (adaptasi) antar manusia dengan lingkungannya telah membangkitkan kekuatan akulturatif yang memacu perkembangan kebudayaan terkait.

Sementara itu lingkungan hidup manusia tidak terbatas pada lingkungan alami, melainkan juga lingkungan hidup sosial-budaya yang terwujud sebagai hasil upaya manusia membina hubungan aktif dengan lingkungan alamnya. Berbagai bentuk kerjasama, sebagai makhluk sosial, manusia telah mengembangkan kelompok struktur organisasi sosial yang pada gilirannya akan mempengaruhi sikap dan tindakan anggota kelompok dalam menyelenggarakan kehidupan bersama. Kehidupan bersama itu memacu pertumbuhan struktur atau jaring-jaring sosial lengkap dengan kedudukan kedudukan dan peran-peran sosial yang melekat pada setiap anggota kelompok. Dengan demikian keterlibatan warga suatu kelompok sosial ke luar lingkungan asal secara intensif akan memperluas jaring sosial dan mempengaruhi struktur sosial kelompok masing-masing dan diikuti dengan pengembangan pranata sosial dan perangkat nilai yang mendukungnya. Semakin tinggi intensitas interaksi sosial lintas kelompok di berbagai arena sosial yang baru, semakin kuat daya akulturasasi yang berlangsung.

Meningkatnya intensitas interaksi lintas kelompok yang memacu percepatan akulturasasi dalam tempo yang cukup tinggi itu telah memicu berbagai reaksi pro dan kontra di kalangan masyarakat, sebagaimana tercermin dalam berbagai pergolakan sosial di daerah-daerah selama masa revolusi integrasi.

Sesungguhnya reaksi sosial terhadap proses akulturasasi yang didorong oleh kekuatan integratif pada awal kemerdekaan merupakan hal yang biasa, lebih

lebih dalam masyarakat pluralistik seperti Indonesia. Dalam masyarakat yang homogen sekalipun reaksi pro dan kontra terhadap perkembangan sosial dan budaya bisa muncul karena perbedaan cara pandang antar generasi. Apalagi kalau perkembangan kebudayaan itu lebih banyak dipacu dengan pengaruh unsur kebudayaan asing.

Tidak dapat disangkal bahwa akulturasi yang berlangsung di awal kemerdekaan bangsa telah mempercepat perkembangan kebudayaan bangsa dengan tukar menukar dan pinjam meminjam unsur kebudayaan antar sesama kelompok sosial budaya setempat. Akan tetapi terdorong oleh kebutuhan dalam pembangunan bangsa, tidak sedikit unsur kebudayaan asing yang diserap (*adoption*) untuk mempercepat akulturasi pada waktu itu.

Di bidang administrasi pemerintahan, misalnya, kelompok-kelompok sosial-budaya yang semula mandiri terpaksa harus meleburkan diri kedalam sistem pemerintahan nasional yang dikembangkan dengan mengadopsi unsur kebudayaan baru, baik yang berasal dari kebudayaan daerah maupun asing. Sebagai contoh dapat dikemukakan reaksi masyarakat Jawa terhadap penyeragaman administrasi pemerintahan yang menghapuskan sistem kerajaan. Dengan argumen yang dikaitkan dengan perangkat nilai budaya, mereka berusaha mempertahankan sistem kerajaan "*semut saja punya raja, masa manusia tidak punya raja*". Tanggapan tersebut tidak urung memancing tanggapan lain yang menolaknya dengan dalih memajukan nilai-nilai demokratik. Suasana batin yang bernuansa budaya itu mencerminkan betapa masyarakat mengalami perubahan sosial-budaya yang menuntut proses adaptasi dan penyesuaian (*readjustment process*) yang dapat memicu kejutan budaya apabila terakumulasi tanpa penyelesaian yang bijak.

Sementara itu, berbagai peraturan dan hukum kolonial tetap diberlakukan dengan berbagai penyesuaian yang pada gilirannya telah menimbulkan berbagai reaksi sosial, yang pada gilirannya telah ikut memacu pengembangan kebudayaan nasional, khususnya di bidang administrasi pemerintahan, politik, keuangan dan pendidikan.

Sesungguhnya, sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa hidup dalam kelompok-kelompok yang menciptakan lingkungan sosial yang dapat menjamin kebutuhan keamanan dengan membina kerjasama untuk memenuhi kebutuhan akan makanan dan menjamin kelangsungan hidup

generasi penerusnya. Untuk menjamin keteraturan interaksi dan ketertiban hidup bersama, maka dikembangkanlah organisasi sosial dengan mengacu pada perangkat nilai budaya sebagai abstraksi pengalaman hidup mereka. Dengan demikian, kehidupan bersama itu mewujudkan hubungan-hubungan sosial yang tetap dengan kelembagaan serta fungsi masing-masing.

Perubahan lingkungan hidup dalam arti luas, terutama lingkungan hidup sosial, dapat memicu pengembangan pola adaptasi yang antara lain perluasan dan keragaman jaring-jaring atau struktur sosial masyarakat yang bersangkutan. Tidaklah berlebihan kalau perluasan jaringan sosial kelompok-kelompok yang membentuk satu bangsa telah memicu akulturasi yang mempengaruhi keberadaan dan fungsi kelembagaan sosial dan perangkat nilai yang selama ini mendominasi kehidupan mereka. Kelompok sosial yang semula terwujud atas dasar hubungan kekerabatan, harus menerima pola-pola hubungan di luar kekerabatan (*extra family organization*) dengan berbagai kedudukan dan peran-peran sosial yang bagi sebagian warga masih asing. Kegagalan pembentukan koperasi di pedesaan Papua selama pemerintahan Orde Baru, mencerminkan betapa sulitnya bagi mereka untuk menggalang kerjasama lintas lingkungan kerabat (*intra family organization*). Pengurus koperasi yang terbentuk dalam rapat anggota secara tempimpin, merasa ganjil harus melayani kepentingan anggota yang tidak jelas hubungan kekerabatannya. Contoh kecil lainnya adalah hambatan pembangunan pendidikan di sepanjang pantai Selatan Papua. Pendirian sekolah tidak menjamin banyaknya orang tua mengirimkan anak mereka ke sekolah, terutama anak bagi anak gadis. Penduduk setempat biasa hidup dalam komunitas kecil dalam perkampungan yang terpencar. Komunitas-komunitas itu saling bermusuhan tetapi juga saling mengisi dalam pemenuhan kebutuhan mempelai perempuan yang mahal harganya. Pembangunan sekolah yang dimaksud untuk menampung anak-anak dan remaja putra dan putri dari berbagai kampung yang bermusuhan dapat merusak pola hubungan kawin antar kampung, karena sekolah menjadi arena pertemuan remaja putra dan putri untuk membina saling pengertian dan berakhir pada tindakan kawin lari.

Proses adaptasi budaya dalam skala kecil dan lokal sampai yang berskala luas dan nasional itu telah memicu akulturasi dan mendorong percepatan pengembangan kebudayaan secara nasional. Dalam kenyataan, dengan

ataupun tanpa amanat UUD 1945, pengembangan kebudayaan bangsa telah berlangsung sejak kelahiran bangsa yang dipacu oleh meningkatnya intensitas interaksi antar penduduk dan pengembangan administrasi pemerintahan yang tidak mengenal batas lingkungan kelompok sosial, kesukuan, kedaerahan maupun kebudayaan.

### **Percepatan Akulturasi di Masa Revolusi Integrasi**

Sesungguhnya proses adaptasi dan akomodasi social-budaya dalam rangka integrasi nasional, secara keseluruhan, telah dapat dilalui dengan berbagai kendala dan peluangnya. Kebudayaan "lama dan asli" yang tersebar sebagai puncak-puncak kebudayaan sebagian besar telah dapat diakomodasi ke dalam kebudayaan nasional maupun kebudayaan daerah masing-masing.

Kegigihan sementara masyarakat untuk mempertahankan kebudayaan lama dan asli lebih terarah kepada usaha masyarakat daerah untuk mempertahankan identitas "kelompok" daripada fungsinya sebagai kerangka acuan dalam beradaptasi terhadap lingkungannya yang baru. Semangat untuk mengembangkan dan merawat kebudayaan "lama dan asli" juga mulai mengendur karena adanya kenyataan bahwa kebudayaan daerah mereka pun mengalami perkembangan. Tidak statik sebagaimana apa yang mereka pahami selama ini.

Di awal kemerdekaan atau masa revolusi integratif perubahan kebudayaan di Indonesia terasa lebih banyak mengarah pada sistem pranata sosial dan perangkat nilai yang terkait dengan perluasan jaring sosial lintaskelompok ke arah nasional. Perluasan jaring sosial yang semula bertumpu dan terbatas lingkupnya pada hubungan kerabat ataupun kedaerahan ke arah nasional telah memicu berbagai keresahan dalam proses adaptasi dan akomodasinya satu sama lain.

Walaupun masyarakat pada umumnya menerima kenyataan yang timbul sebagai akibat kelahiran bangsa sebagai kelompok sosial baru yang meliputi, perubahan sekecil apapun yang menyangkut kelangsungan hidup kelompok sosial yang bersangkutan akan senantiasa memancing reaksi pro dan kontra. Melemahnya organisasi sosial atas dasar hubungan kerabat dan perluasan jaring sosial lintaskelompok kecil telah menimbulkan kebutuhan akan organisasi sosial baru sebagai wadah yang dapat

menampung dan memperjuangkan kepentingan warganya. Sebaliknya, pembentukan organisasi sosial memerlukan pengembangan pranata sosial dan perangkat nilai budaya yang mendukungnya.

Pembentukan partai politik sebagai salah satu wadah organisasi lintaskelompok kekerabatan dan kedaerahan telah menimbulkan berbagai pranata sosial dan perangkat nilai sebagai pedoman dan kerangka acuan untuk menata dan mengembangkan pola-pola interaksi sosial yang efektif.

Pada mulanya, pendirian partai politik sebagai wadah organisasi yang dimaksud menampung dan memperjuangkan aspirasi anggotanya yang berasal dari berbagai kelompok kesukuan maupun kedaerahan belum dapat melepaskan diri dari tradisi sebelumnya. Hal itu tercermin dalam perwakilan organisasi dalam Kongres Pemuda 1928. Demikian pula berbagai perserikatan sosial yang dibentuk sebagai wadah perjuangan masih menggunakan simbol kebudayaan dan keagamaan. Tradisi itu berlanjut dengan pembentukan badan badan perjuangan bersenjata dan partai politik, walaupun kegiatan mereka sudah terarah pada pencapaian kepentingan nasional.

### **Percepatan Akulturasi di Masa Pembangunan Nasional**

Tumbangnya pemerintahan Orde Lama disusul dengan berdirinya pemerintahan Orde Baru yang beranggapan bahwa revolusi integrasi telah selesai. Karena itu, perjuangan bangsa dilanjutkan dengan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Untuk mempercepat usaha terencana dalam meningkatkan kesejahteraan umum, pembangunan nasional di tekankan pada sektor ekonomi. Sementara itu, perkembangan sosial dan kebudayaan diharapkan akan dapat mengikuti keberhasilan pengembangan kesejahteraan umum.

Dalam kenyataannya, pembangunan nasional yang dititik beratkan pada pembangunan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan umum tidak berjalan semulus seperti yang diharapkan. Pembangunan nasional sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan umum dalam kurun waktu tertentu pada hakekatnya merupakan kekuatan perubahan yang sangat kuat. Tanpa dukungan dan kesadaran sosial-budaya dan masyarakat akan terjadinya perubahan secara besar-besaran, niscaya sasaran suatu

pembangunan dapat mencapai sasaran secara optimal. Pembangunan nasional sebagai upaya perubahan terencana menuju sasaran yang lebih baik dalam kurun waktu tertentu harus ditopang dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) modern yang mahal biayanya dan arena itu harus dikelola secara intensif. Dalam pelaksanaannya, iptek itu harus dikendalikan oleh tenaga kerja manusia yang trampil dan professional serta sikap mental yang menunjangnya. Kenyataan ini menuntut penerapan nilai budaya dan organisasi sosial yang mendukung tercapainya efisiensi dan produktivitas tinggi.

Sesungguhnya, sejak awal pelaksanaan pembangunan telah diperlukan dukungan sosial-budaya demi tercapainya sasaran secara maksimal. Akan tetapi, seringkali justru faktor sosial-budaya itu disepelekan dengan keyakinan bahwa ia akan mengikuti perkembangan dan kemajuan pembangunan. Pendapat tersebut tidak terlalu menyimpang dari beberapa teori antropologi. Ada sementara pendapat yang menyatakan bahwa pada hakikatnya kebudayaan itu merupakan keseluruhan yang terintegrasi (*integrated whole*) dari sistem teknologi, sistem sosial, dan sistem nilai. Kelompok materialis menilai tinggi sistem teknologi yang dianggap sebagai motor yang dapat memacu perkembangan kebudayaan secara keseluruhan. Unsur teknologi dapat mendorong perkembangan pranata sosial sebagai kendali dalam mengatur ketertiban kerja. Demikian pula sistem teknologi dapat memacu perkembangan perangkat nilai budaya sebagai abstraksi pengalaman yang dikemudian hari akan berfungsi sebagai kerangka acuan bersama.

Akan tetapi, kaum behavioris lebih menekankan pada pentingnya organisasi sosial sebagai sistem penataan sosial yang dapat menjamin ketertiban dan efisiensi kerja. Di lain pihak, kelompok esensialis berpendapat bahwa perangkat nilai menjadi bagian utama dari kebudayaan, karena sesungguhnya apa yang dilihat, apa yang didengar dan apa yang dipikirkan manusia itu tidak bebas dari pengaruh sistem nilai yang mendominasinya. Sistem nilai itu seolah-olah merupakan pedoman yang memberi makna dan tujuan hidup serta cara pencapaiannya secara efisien dan efektif.

Terlepas dari ketiga kerangka teori termaksud, ketiga unsur besar kebudayaan itu saling mengisi sebagai kerangka acuan manusia dalam setiap menentukan langkah dan mengambil kebijakan. Manusia, sebagai

mahluk yang tertinggi derajatnya dengan kemampuan akal dan ketrampilan kerja kedua tangganya memerlukan ketiga unsur besar kebudayaan secara simultan.

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang ditopang dengan penerapan iptek modern, menuntut pengerahan sumberdaya manusia yang trampil dan profesional. Penerapan iptek modern yang mahal harus dikelola secara profesional agar dapat mendatangkan keuntungan semaksimal mungkin. Karena itu, lambat atau cepat penerapan iptek modern akan mempengaruhi sikap mental sumberdaya manusia sebagai operatornya dengan mengacu pada perangkat nilai demi tercapainya efisiensi dan produktivitas kerja yang tinggi. Pada gilirannya, perubahan sikap mental yang terjadi di kalangan pekerja akan memacu perkembangan budaya kerja ataupun kebudayaan korporasi yang akan mempercepat akulturasi lebih luas.

Sebagaimana berlaku, setiap keping penemuan ataupun rekayasa teknologi akan memacu serangkaian pembaharuan dalam sistem budaya terkait. Karena itu, penerapan iptek modern sebagai satu kompleks kebudayaan (*culture complex*) dapat memancing reaksi sosial di lingkungan masyarakat terkait. Pada masyarakat tradisional yang menerapkan teknologi sederhana dalam mengolah sumberdaya alam, biasanya perangkat nilai yang masih dominan adalah yang menghargai tinggi keseimbangan fungsi lingkungan dan akan merasa terganggu dengan penerapan teknologi yang cenderung ekspansif dan eksploitatif. Nilai-nilai budaya baru yang terbawa serta sebagai kerangka acuan dalam penerapan iptek modern, seperti efisiensi, penuh perhitungan dan berencana dalam setiap kegiatan guna mengejar keuntungan materi semaksimal mungkin seringkali menimbulkan reaksi di kalangan masyarakat tradisional.

Masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih didominasi perangkat nilai yang berkembang atas dasar ekonomi subsistensi dengan menerapkan teknologi sederhana lebih menghargai pelestarian keseimbangan fungsi lingkungan, dan mengutamakan keuntungan sosial dalam usahanya. Pengerahan banyak tenaga kerja merupakan mekanisme untuk berbagi kebahagiaan, guna menghindari penilaian negatif di kalangan tetangga (baca G.M. Foster, "Peasant Society and the Image of Limited Good", 1965). Karena itu, penerapan iptek modern di kalangan masyarakat Indonesia yang

mayoritas penduduknya masih didominasi nilai-nilai budaya yang berkembang atas dasar perekonomian subsistensi seringkali menimbulkan reaksi pro dan kontra yang beragam, terutama yang terkait dengan perkembangan sikap mental yang melanda di kalangan masyarakat. Keberhasilan usaha seseorang yang melebihi "keumuman" dicurigai telah menggunakan bantuan kekuatan gaib yang dapat mengurangi jatah keberuntungan para tetangganya.

Akulturasi di bidang ekonomi menghadapi kenyataan masih kuatnya perangkat nilai budaya yang bertumpu pada ekonomi subsistensi dalam perkembangannya. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih didominasi perangkat nilai budaya ekonomi subsisten, yang orientasi kerjanya sekedar memenuhi kebutuhan hidup keluarga dari hari ke hari. Ungkapan "*ono rino ono upo*" atau "ada hari ada nasi" yang mencerminkan optimisme orang Jawa di masa lampau, berubah menjadi pelipur lara bagi mereka yang tidak mampu bersaing memprebutkan rezeki.

Nilai nilai budaya yang menghargai daya saing dalam dalam mengejar keuntungan materi dalam kegiatan ekonomi yang berorientasi pasar belum sepenuhnya terserap dan dapat menggeser perangkat nilai-nilai tradisional yang berkembang atas dasar ekonomi subsistensi. Unsur- unsur kebudayaan baru (*culture traits*) yang menyertai perluasan dan intensitas kegiatan ekonomi pasar sebagai *culture complex* yang menyertai kegiatan pembangunan nasional belum terserap ke dalam kebudayaan bangsa secara menyeluruh.

Karena itu, meningkatnya kegiatan dan perluasan jaring ekonomi pasar yang menjadi tulang punggung pembangunan nasional telah menimbulkan berbagai reaksi sosial dan menjadi kekuatan percepatan akulturasi di era pembangunan nasional. Persaingan yang tidak berimbang antar kelompok sosial yang masih didominasi perangkat nilai budaya yang bertumpu pada ekonomi subsistensi menghadapi mereka yang telah akrab dengan perangkat nilai budaya ekonomi pasar dalam memperebutkan rezeki dan peluang usaha telah menjadi salah satu kekuatan sosial yang mendorong percepatan akulturasi di era pembangunan nasional.

Percepatan akulturasi di masa pembangunan nasional juga dipacu dengan meningkatnya kesejahteraan umum sementara masyarakat Indonesia. Sementara itu, meningkatnya kesejahteraan hidup senantiasa diikuti dengan

meningkatnya kebutuhan hidup dalam besaran, mutu, maupun ragamnya. Meningkatnya kebutuhan hidup itu tidak terbatas pada kebutuhan fisik dan material, melainkan juga kebutuhan hidup sosial dan kemanusiaan yang tidak mudah untuk diabaikan. Berbagai sarana dan prasarana harus dikembangkan, termasuk pranata pembangunan dan perangkat nilai sebagai pembenaran perubahan sikap dan pola tingkah laku yang berkembang mengikuti mobilitas sosial mereka. Pemenuhan kebutuhan hidup yang mengikuti peningkatan kesejahteraan umum, tanpa disadari telah menjadi kekuatan yang dapat mempercepat akulturasi. Gaya hidup baru dan lambang lambang keberhasilan (*establishment*), baik dalam bentuk gaya hidup, pola konsumsi, relaksasi, sampai pada perluasan dan ragam pergaulan sosial terus berkembang diikuti dengan pranata sosial dan perangkat nilai sebagai acuan pembenarannya.

Percepatan akulturasi di masa pembangunan nasional juga dipacu dengan meningkatnya intensitas pengolahan sumberdaya alam yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang meningkat serta pembangunan industri. Peningkatan intensitas pengolahan sumber daya alam secara besar-besaran telah menggusur perangkat nilai budaya tradisional yang mengutamakan perawatan keseimbangan fungsi lingkungan demi kesejahteraan hidup penduduk setempat.

Tanpa disadari, pengolahan sumberdaya alam dengan penerapan teknologi canggih yang mahal biayanya telah membawa serta nilai-nilai budaya yang mendorong penerapannya secara eksploitatif dan ekspansif tanpa memperhatikan kondisi lingkungan sosial-budaya masyarakat sekitar. Persaingan yang tidak berimbang antara pengusaha besar dengan penduduk setempat yang masih didominasi perangkat nilai budaya ekonomi subsistensi tidak terhindarkan. "Hukum rimba" yang memenangkan mereka yang memiliki keunggulan telah membangkitkan perlawanan penduduk yang kurang beruntung secara fisik, sosial maupun budaya. Perlawanan penduduk itu, tanpa disadari, telah memacu akulturasi yang dapat mengembangkan pranata sosial dan perangkat nilai yang menguntungkan semua pihak. Kekuatan akulturasi itu telah tercermin dalam upaya penduduk menggalang kekuatan massa dengan mengaktifkan lambang ikatan primordial sempit untuk memenangi persaingan yang tidak berimbang. Pengerahan massa secara besar-besaran seolah berkembang sebagai model

atau pilihan strategi yang lama-kelamaan akan melembaga (*institutionalized*).

Percepatan akulturasi di masa pembangunan nasional juga berlangsung sebagai akibat perubahan lingkungan hidup masyarakat Indonesia. Pengolahan sumberdaya alam secara besar-besaran, pembangunan industri yang bertumpu pada sumberdaya alam sebagai bahan baku secara besar-besaran. Penebangan hutan, penambangan batu bara dan mineral telah mengubah lingkungan fisik dan fungsi lingkungan alam, yang pada gilirannya akan mendorong penduduk setempat harus menyesuaikan kembali pola-pola adaptasi mereka. Adaptasi aktif penduduk itu tidak terbatas pada lingkungan fisiknya yang berubah, melainkan juga terhadap lingkungan sosial-budaya yang terbuka lebar terhadap pengaruh kebudayaan "asing". Proses penyesuaian kembali terhadap lingkungan hidup yang baru itu, pada gilirannya, berkembang menjadi kekuatan yang dapat mempercepat perkembangan kebudayaan sebagai kerangka acuan bagi mereka selama ini.

### **Percepatan Akulturasi di Era Globalisasi**

Percepatan akulturasi di era globalisasi dewasa ini dipacu oleh dua kekuatan pembaharuan kebudayaan yang sangat kuat. Pertama-tama adalah meningkatnya kegiatan ekonomi global dan yang kedua adalah perkembangan media komunikasi dan transportasi modern yang menopangnya.

Dampak globalisasi yang ditopang oleh meningkatnya kegiatan perdagangan bebas yang mendunia, tanpa disadari, telah memacu percepatan akulturasi di Indonesia dengan ditandai munculnya berbagai masalah sosial, politik dan hukum yang dikhawatirkan akan mengancam keutuhan bangsa Indonesia yang menghormati Kebhinnekaan tunggal ika. Globalisasi perdagangan bebas yang semula diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk dunia dengan menggalakkan ekspor ternyata telah gagal. Kegiatan bebas lintas negara itu justru mempertajam kesenjangan antara kelompok kaya dengan kelompok miskin di banyak negara yang sedang berkembang. Sementara penghasilan rata-rata penduduk dunia meningkat sebesar 2,5%, jumlah penduduk miskin di dunia

meningkat menjadi 100 juta dalam kurun waktu yang bersamaan (1990), sebagaimana dikemukakan oleh Joseph Stiglitz (2002). Terlepas dari kebijakan politik maupun ekonomi dunia, kenyataan tersebut menunjukkan kurangnya kesiapan sosial-budaya masyarakat di berbagai negara yang sedang berkembang. Mau atau tidak, senang atau tidak, masyarakat harus mengejar kesenjangan kesiapan mereka dalam memanfaatkan peluang dengan percepatan akulturasi.

Pertikaian sosial secara sporadis di berbagai daerah merupakan perwujudan reaksi masyarakat terhadap percepatan perkembangan kebudayaan bangsa dalam proses akulturasi terbuka. Sesungguhnya, gejala tukar-menukar dan pinjam-meminjam unsur kebudayaan antarbangsa sudah dan senantiasa berlangsung sejak awal kehadiran manusia di muka bumi. Kontak-kontak budaya antarbangsa tidak mungkin dihindari, karena selain manusia merupakan makhluk hidup yang paling tinggi dan luas jangkauan mobilitasnya, manusia tidak mungkin mengembangkan kebudayaan masing-masing kelompoknya hanya dengan mengandalkan kemampuan *local genius* yang sangat terbatas kehadirannya.

Demikian pula, sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa berusaha untuk memperluas jaringan dan meningkatkan intensitas interaksi dengan sesamanya dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka yang cenderung terus meningkat dalam jumlah, ragam, dan mutunya. Karena itu, globalisasi yang ditopang perluasan jarring perdagangan bebas merupakan gejala sosial biasa. Kegiatan perdagangan, di mana pun dan kapan pun senantiasa menjadi jembatan yang memperlancar kontak budaya (*cultural contact*) antarbangsa yang dapat memicu perkembangan kebudayaan-kebudayaan masyarakat yang terlibat. Mengikuti kegiatan perdagangan, tukar menukar dan pinjam-meminjam unsur kebudayaan berlangsung secara damai, sehingga bangsa-bangsa yang terlibat dalam perdagangan itu akan mengalami percepatan akulturasi.

Sebagaimana yang terjadi di berbagai kawasan lain dunia, penduduk kepulauan Nusantara, yang terletak di persimpangan jalur pelayaran dunia, telah terlibat dalam kegiatan perdagangan global, baik sebagai penghasil rempah-rempah maupun sebagai sasaran perdagangan sutra dan tembikar dunia. Dengan demikian, sebagian masyarakat Indonesia berpeluang untuk memperkaya khasanah dan mengembangkan kebudayaan mereka, baik

dengan berbagai penemuan ataupun rekayasa setempat (*local invention and discovery*) maupun dengan pinjam-meminjam dan tukar-menukar unsur kebudayaan asing (*cultural diffusion*).

Walaupun pengembangan kebudayaan lewat kontak antarbudaya merupakan kejadian yang biasa dalam kehidupan manusia sepanjang masa, tidak jarang perkembangan kebudayaan menimbulkan reaksi pro dan kontra di kalangan masyarakat yang bersangkutan. Pertikaian antara generasi pendahulu dengan generasi penerus merupakan hal yang umum terjadi.

Generasi pendahulu biasanya memuja-muja kejayaan masa lampau (*post figurative*) karena mereka dilahirkan dan dibesarkan serta meraih keberhasilan dengan kerangka acuan kebudayaan yang membesarkannya. Mereka cenderung menolak setiap bentuk perubahan karena kekhawatiran akan mengancam keamanan. Padahal, cepat atau lambat setiap kebudayaan mengalami perkembangan. Demikian pula masyarakat tidak mungkin mempertahankan kemurnian suatu kebudayaan karena berbagai penemuan dan pengembangan setempat maupun karena persebaran kebudayaan asing. Kalaupun ada kebudayaan yang dianggap murni, kemurnian itu tidak lebih dari 13% saja.

Sementara itu, generasi penerus dengan dinamikanya berusaha melakukan perubahan budaya dengan harapan akan membuka peluang bagi mereka untuk meniti mobilitas sosial dan mencapai keamanan. Mereka didominasi pandangan yang mengutamakan kekinian (*co figurative*) dalam perjuangan meraih keamanan. Perbedaan cara pandang itulah yang biasanya membangkitkan pertikaian antargenerasi dalam suatu masyarakat dalam menghadapi perkembangan kebudayaan. Generasi pendahulu cenderung konservatif karena kekhawatiran akan perubahan yang dapat mengancam keamanan mereka, sementara generasi muda yang sedang memperjuangkan keamanan mendambakan perubahan yang membuka peluang bagi mobilitas sosial mereka.

Sesungguhnya, kedua cara pandang itu saling mengisi karena setiap kebudayaan, cepat atau lambat, senantiasa mengalami perkembangan. Semangat generasi penerus untuk menggerakkan perubahan sangat di perlukan dalam usaha beradaptasi terhadap lingkungan hidup yang juga mengalami perubahan. Akan tetapi perkembangan itu jangan sampai terlepas dari akar budaya yang menjadi landasan pembentukan kepribadian

masyarakatnya. Demikian pula perkembangan suatu kebudayaan tidak mungkin ditolak karena adanya kekuatan dari dalam masyarakat, maupun tekanan perubahan lingkungan hidup dalam arti luas maupun perkembangan iptek yang mempermudah manusia beradaptasi.

Apa yang seringkali menimbulkan masalah sosial dalam pengembangan suatu kebudayaan adalah tempo yang tinggi dan luasnya lingkup perkembangan kebudayaan yang berlangsung.

Kurangnya peluang bagi masyarakat untuk memilih dan memilah unsur kebudayaan dan terbatasnya waktu untuk menyerap pembaharuan seringkali menyebabkan terjadinya pertikaian sosial yang tidak terkendali sebagaimana terjadi di banyak negara yang sedang berkembang, seperti di Afrika, Amerika Latin, dan Timur Tengah. Kesenjangan kemampuan penyerapan dan penghayatan masyarakat terhadap pembaharuan kebudayaan yang berlangsung cepat dapat menimbulkan kejutan budaya yang diikuti dengan berbagai reaksi pro dan kontra di kalangan masyarakat, lebih-lebih di kalangan masyarakat yang pluralistik seperti Indonesia. Kurangnya perhatian terhadap reaksi sosial yang kurang menguntungkan itu dapat membahayakan keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa yang baru dibangun. Ancaman itu sering kali di perkuat oleh munculnya oknum atau intervensi pihak luar yang ingin mendapatkan keuntungan ekonomi, sosial, maupun politik dengan memperkeruh suasana akulturasi yang sedang berlangsung.

Di samping meningkatnya intensitas kegiatan dan semakin luasnya jangkauan jaringannya yang meningkatkan percepatan akulturasi di era globalisasi dewasa ini, tidak kalah kuatnya pengaruh media komunikasi dan informasi yang ditopang dengan penerapan iptek modern. Intensifikasi dan ekstensifikasi penggunaan media elektronik digital dalam persaingan dagang secara global telah menjadi kekuatan besar dalam memacu proses akulturasi di Indonesia. Penerapan teknologi modern di bidang komunikasi dan informasi tidak terbatas fungsinya sebagai pendukung kegiatan ekonomi, melainkan meluas pengaruhnya dan meliputi berbagai bidang kegiatan sosial, budaya dan politik. Dewasa ini hampir tidak ada penduduk Indonesia yang tidak memerlukan media komunikasi elektronik dalam hidupnya. Bahkan di kalangan komunitas terasing, terutama di kalangan suku Anak

Dalam di Jambi, penggunaan telepon genggam di kalangan generasi mudanya sudah tidak asing lagi.

Apa yang kurang menguntungkan dalam penerimaan sarana komunikasi jarak jauh sebagai kebudayaan materiil itu tidak diimbangi dengan pengembangan pranata sosial dan perangkat nilai budaya sebagai penopang. Kelancaran berkomunikasi jarak jauh dengan menggunakan media elektronika modern itu seringkali menimbulkan berbagai keresahan sosial. Bukan karena teknologinya yang memperlancar komunikasi, melainkan penyebaran isi dan sifat pesan pesan yang seringkali tidak mengindahkan tatanan dan ketertiban sosial serta perangkat nilai yang berlaku di kalangan masyarakat yang pluralistik.

Sesungguhnya, tidak kecil manfaat penerapan iptek di bidang komunikasi bagi peningkatan kesejahteraan penduduk pada umumnya. Dewasa ini orang tidak ragu-ragu melepas anggota keluarga jauh meninggalkan kampung halaman. Tukar menukar informasi untuk memperlancar kegiatan ekonomi dan menambah pengetahuan dapat dilakukan melalui media sosial. Perkembangan *impersonal communication* atau hubungan jarak jauh secara tidak langsung telah dapat diterima sebagai pengganti *interpersonal communication*, walaupun mengurangi kepekaan "perasaan". Apa yang seringkali menimbulkan keresahan sosial adalah penggunaan teknologi informasi yang kurang atau sengaja tidak dilakukan secara lebih bertanggung jawab.

Tidak dapat disangkal bahwa penggunaan teknologi informasi, khususnya media sosial dewasa ini, telah mampu memperkenalkan dengan cepat nilai-nilai budaya dan berbagai model organisasi sosial baru. Nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi dan pengawasan sosial, keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan telah disebarluaskan secara intensif melalui media sosial. Masyarakatpun dengan cepat menerimanya atau mengadopsi, walaupun belum tentu menyerapnya atau mengintegrasikannya ke dalam sistem budaya mereka. Akibatnya, penerapan dan pengungkapan (*manifestation and expression*) perangkat nilai baru itu tidak disertai dengan pranata sosial yang mendukungnya, seperti penuh perhitungan, terencana dengan melihat jauh ke depan, dan bertanggung jawab. Tidak mengherankan kalau penerimaan sejumlah nilai budaya baru dalam rangka

demokratisasi kehidupan berbangsa dan berbegara, seringkali memacu gejala percepatan akulturasi dengan segala akibatnya.

Pertikaian akibat percepatan akulturasi tanpa kesiapan sosial itu seringkali dimanfaatkan oleh mereka yang melihat peluang untuk mengejar keuntungan, ekonomi, sosial, dan politik. Seringkali mereka itu tidak mengindahkan dampak dari perbuatannya terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sesungguhnya, akulturasi merupakan hal yang biasa dihadapi oleh setiap masyarakat manusia di mana pun dan kapan pun. Meski perubahan sekecil apa pun dapat menimbulkan reaksi pro dan kontra, tergantung pada persepsi budaya masing-masing, akan tetapi setiap masyarakat mempunyai mekanisme untuk mengatasi konflik dan menciptakan konformasi (*conflict and conformation*). Pertikaian sosial yang terkendali justru akan membangkitkan dinamika masyarakat untuk maju bersama.

Apa yang perlu diwaspadai adalah adanya orang perorangan yang dalam menanggapi tantangan dengan pilihan strategi adaptasi (kebudayaan) yang terbatas cenderung untuk mengaktifkan budaya "amuk" yang lebih populer di kalangan masyarakat Melayu. Pilihan strategi *ngamuk*, karena keterbatasan pilihan budaya, itu biasanya menimbulkan korban baik di pihak lawan maupun dirinya sendiri. Pengerahan massa tanpa kendali biasanya berakhir dengan kebringasan dan amuk yang menimbulkan kerugian semua pihak yang terlibat, bahkan dapat menjangkau mereka yang tidak ada kaitannya dengan aksi demonstrasi yang dilakukan.

Selain karena keterbatasan pilihan strategi adaptasi, akulturasi yang terlalu cepat, terutama karena derasnya arus pengaruh kebudayaan asing, dapat menimbulkan kegamangan di kalangan masyarakat dalam memilih dan memilah difusi kebudayaan yang hendak diserapnya. Keterbatasan waktu untuk menyerapnya ke dalam sistem budaya setempat dapat menimbulkan kekacauan atau kegamangan masyarakat dalam menentukan pilihan perangkat sosial ataupun nilai-nilai budaya baru. Dihadapkan pada banyaknya pilihan pranata sosial dan perangkat nilai budaya lama dan baru sebagai pilihan strategi, masyarakat dapat bereaksi menutup diri terhadap segala bentuk pembaharuan. Kegamangan hidup masyarakat dalam menghadapi akulturasi itu membuka peluang bagi orang per orang ataupun

kelompok sosial yang berusaha meraih keuntungan sosial, ekonomi, maupun politik.

Sesungguhnya, kecepatan dan luasnya jangkauan penyebaran informasi dan komunikasi yang dapat menjangkau seluruh pelosok dalam jangka waktu yang bersamaan telah berhasil memperluas cakrawala pandangan penduduk di kepulauan Nusantara. Disamping itu, media sosial yang ditopang penerapan teknologi canggih telah membantu masyarakat dalam mendapatkan dan menyebarluaskan informasi, serta menawarkan ide dan mengajak masyarakat untuk mendengar, menerima pesan, bahkan ikut bergerak tanpa peluang untuk menentukan pilihan secara tepat. Akan tetapi, promosi berbagai ide pembaharuan dan perubahan yang mendominasi penyebaran pesan komersial, sosial, dan politik itu pada gilirannya dapat mengusik tatanan sosial setempat dalam proses penyerapannya.

Betapa pesan demokratisasi dan keterbukaan serta nilai nilai kebersamaan dengan cepat mengikuti intensitas perdagangan yang memang memerlukan perangkat nilai tersebut. Akan tetapi, kebebasan berbusana, gaya hidup, dan pergaulan bebas senantiasa dianggap sebagai ancaman sosial oleh sementara pihak yang kurang mampu untuk melakukan pilihan secara mandiri. Percepatan akulturasi itulah yang seringkali membangkitkan kerisauan dan bahkan pertikaian sosial secara damai maupun yang disertai kekerasan dalam masyarakat pluralistik.

Percepatan akulturasi di era globalisasi dewasa ini juga dipacu persaingan antar sesama negara industri dalam memperebutkan sumberdaya alam dengan penerapan iptek modern yang cenderung ekspansif dan eksploitatif. Sementara itu, masyarakat masih terbelakang dalam mengolah sumberdaya alam dan mengelola lingkungannya. Eksploitasi sumberdaya alam secara ekspansif dan eksploitatif tanpa mengenal batas lingkungan dan waktu itu telah mempercepat pengurasan sumberdaya alam dan peluang usaha serta memancing pertikaian sosial dengan disertai ataupun tanpa kekerasan. Sebagaimana di kemukakan Dixon dalam hipotesisnya, gejala pengurasan sumberdaya alam secara besar besaran telah menimbulkan kesan terjadinya kelangkaan sumberdaya yang dapat memacu persaingan tidak sehat di kalangan masyarakat. Hanya mereka yang mempunyai keunggulan teknologi dan kekuasaan yang akan keluar sebagai pemenang. Mereka yang kurang beruntung tidak mempunyai jalan lain kecuali menggalang kekuatan

massa dengan mengaktifkan lambang-lambang ikatan primordial sempit. Lambang atau simbol ikatan primordial yang efektif dewasa ini adalah kesukubangsaan, kedaerahan, rasial, dan keagamaan.

Sesungguhnya hipotesis Th. Dixon (1967), yang menitik beratkan pada kelangkaan ekologi (*ecological scarcity*), dapat diperluas dengan kelangkaan peluang usaha yang dimonopoli oleh pengusaha besar dan menyisihkan pengusaha kecil dan menengah. Kesenjangan kemampuan bersaing itu, bukan semata mata karena keterbatasan modal, melainkan juga karena orientasi budaya yang mendominasi mereka. Karena itu, suntikan modal bagi pengusaha kecil dan menengah harus dilengkapi dengan pengembangan orientasi nilai sebagaimana dikemukakan oleh Inkeles dalam karyanya tentang perangkat nilai budaya bagi manusia modern (baca Alex Inkeles, *Becoming Modern*, 1999)

Sementara itu, persaingan dagang dan perebutan sumberdaya alam secara besar-besaran di era globalisasi telah membawa serta pranata sosial dan perangkat nilai yang melekat. Salah satu unsur kebudayaan yang dominan dalam pemasaran produk industri maju adalah penerapan teknologi informasi yang mempermudah penduduk untuk berkomunikasi jarak jauh tanpa mengenal batas wilayah kebudayaan maupun geografis. Dengan gencarnya produsen maupun pedagang memasarkan barang dagangannya, mulai dari obat kuat sampai pakaian dalam dan mode busana mutakhir tanpa mengindahkan norma dan etika masyarakat yang di sasarinya. Tidak urung kegiatan promosi dan penyebaran produk industri maju yang ditopang dengan penerapan teknologi canggih dan sarana transportasi telah menjangkau seluruh penjuru Tanah Air.

Walaupun kegiatan pemasaran itu telah berhasil memasyarakatkan berbagai macam produk baru dan mengubah pola konsumsi masyarakat sampai ke daerah pedesaan, reaksi perlawanan terhadap masuknya pranata sosial dan perangkat nilai baru pun tidak terhindarkan. Sementara ada daerah yang melarang penggunaan produk tertentu dengan menerbitkan berbagai Peraturan Daerah (Perda), akan tetapi tidak kurang pula sikap keterbukaan masyarakat untuk memanfaatkan berbagai produk industri modern, seperti pengembangan mode agamis yang menjadi simbol kemapanan atau perjuangan. Aksi dan reaksi masyarakat di sektor perdagangan telah ikut memacu perkembangan kebudayaan dengan segala bentuknya.

Sayangnya kecepatan penyerapan teknologi informasi dan komunikasi canggih yang mendukung Globalisasi itu tidak diikuti dengan pengembangan pranata sosial dan perangkat nilai sebagai pedoman dalam menegakan tatanan sosial dan penerapannya. Penyalahgunaan media sosial untuk pemasaran obat-obatan terlarang, menawarkan pelayanan seks, sampai penyebaran kebencian dan permusuhan.

Sesungguhnya kemajuan iptek di bidang komunikasi dan informasi sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan nasional dalam meningkatkan kesejahteraan umum secara adil, makmur, dan merata. Dewasa ini penduduk Indonesia dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas sampai Rote telah dapat mengikuti berita nasional maupun internasional. Mereka juga dapat mengikuti gosip tentang kehidupan selebritas dari kalangan artis maupun politisi. Sayangnya, dalam era kesenjangan perkembangan budaya (*culture lag*) ada juga yang memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan gosip ataupun pernyataan kebencian dan permusuhan. Meski tidak adanya peraturan dan perundangan dapat dijadikan alasan, namun sebenarnya pranata sosial maupun perangkat nilai budaya bangsa dan daerah tidak membenarkan tindakan itu.

Kesenjangan perkembangan budaya dalam penerapan iptek di era globalisasi dewasa ini juga terasa dalam penyerapan dan pengembangan perangkat nilai yang mendukung pengembangan daya saing secara sehat di kalangan masyarakat. Nilai-nilai budaya yang mendukung penerapan iptek modern belum disadari manfaatnya, apalagi dihayati sebagai kerangka acuan dalam menghadapi tantangan "modernisasi" yang sarat dengan persaingan.

Kegagalan sebagian warga masyarakat untuk memenangi persaingan di era globalisasi telah mendorong mereka untuk mengaktifkan simbol-simbol ikatan primordial dalam menggagalkan kekuatan. Selain simbol-simbol ikatan primordial sempit, seperti simbol kedaerahan, kesukubangsaan, dan rasial, dewasa ini simbol keagamaan menjadi salah satu andalan untuk menghimpun kekuatan masa dengan tujuan tertentu tanpa mengindahkan kepentingan persatuan dan kesatuan bangsa.

Sesungguhnya, dalam masa pancaroba yang dipacu oleh meluasnya jaring dan meningkatnya intensitas kegiatan pasar bebas yang mendunia, diperlukan pengembangan pranata sosial dan perangkat nilai

sebagai pedoman dan penunjuk arah kegiatan sosial dalam arti luas. Kegagalan atau kelambanan perkembangan pranata sosial dan perangkat nilai budaya sebagai acuan dalam menata kehidupan bermasyarakat yang semakin luas dan beragam jaringannya akan menimbulkan kekacauan orientasi (*social disorientation*). Keadaan sedemikian itu dapat membuka peluang bagi munculnya seorang tokoh yang berani mengambil risiko, kalau perlu melanggar tatanan dan ketegasan terhadap kawan maupun lawan, dan menawarkan gagasan baru untuk memulihkan suasana masa lampau yang "penuh keindahan". Seringkali usaha pemulihan zaman keemasan itu diperkuat dengan semangat religiusitas, sebagai gerakan permurnian terhadap pencemaran dari pengaruh kebudayaan asing. Gerakan yang dilakukan dengan mengaktifkan simbol-simbol keagamaan itu dengan mudah menghimpun kekuatan massa yang fanatik dan dengan mudah digerakkan oleh sang pemimpin yang cenderung menjadi diktator. Dengan demikian, jelaslah bahwa bukan akulturasi atau perubahan kebudayaan yang mengancam tatanan sosial yang tertib, aman, dan damai, melainkan adanya gerakan yang memanfaatkan keresahan masyarakat yang sedang beradaptasi terhadap lingkungan budaya yang sedang mengalami perkembangan, melainkan ancaman yang timbul karena usaha perorangan atau kelompok sosial yang memanfaatkan situasi kegamangan sosial.

### **Masa Depan Kebinekaan Indonesia**

Berkaitan dengan kelangsungan atau masa depan kebinekaan, atau lebih tepatnya Kebhinnekaan Tunggal Ika, masyarakat Indonesia yang pluralistik dalam hal kesukuan, kemasyarakatan, kebudayaan, keagamaan, serta secara rasial, sesungguhnya tergantung pada kesadaran masyarakat dan keteguhan mereka dalam menghormati para pahlawan pendiri bangsa yang telah sepakat untuk menerapkan kebhinnekaan tunggal ika dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Kebhinnekaan tunggal ika sebagai landasan persatuan dan kesatuan bangsa itu pada hakikatnya mengacu pada pengertian kebersamaan dalam keanekaragaman sebagaimana makna asli yang diamanatkan oleh Sri Maha Raja Hayamwuruk dalam mempersatukan warganya yang beragam dalam keagamaan dan sistem kepercayaan yang mendominasi pandangan dan tujuan hidup sebagai kawula kerajaan. Pernyataan Sri Maharaja dalam upaya mempersatukan

kawulanya: "Tan Hana Dharma Mangrwa, Bhinneka Tunggal Ika Hananira" telah menjiwai semangat persatuan bangsa yang melahirkan bangsa Indonesia yang sejak semula mendambakan persatuan dan kesatuan bangsa diatas keanekaragaman kesukuan, kemasyarakatan, kebudayaan, keagamaan, maupun rasial. Dan sebagai platform bersama adalah semangat kebersamaan yang tertanam sejak awal perjuangan merebut kemerdekaan bersama. Semangat kebersamaan yang berkembang sebagai identitas bangsa itu terus dipupuk dengan perangkat nilai budaya Pancasila yang menjadi landasan filosofi dan dikukuhkan dengan penerapan UUD 1945 di segenap bidang kehidupan nasional.

Semangat Kebhinnekaan tunggal Ika yang menjiwai bangsa Indonesia itu harus dirawat dan dipupuk agar terus hidup dan berkembang sebagai perisai terhadap ancaman yang timbul karena dinamika masyarakat Indonesia maupun pengaruh kebudayaan asing yang tidak mungkin dihindari. Untuk menanamkan semangat kebersamaan yang menjadi identitas bangsa, peranan pendidikan dalam arti luas tidak mungkin diabaikan. Pendidikan untuk membekali kemampuan daya saing generasi penerus dengan ketrampilan kerja dan pengetahuan harus dilandasi dengan pendidikan guna membentuk kepribadian yang kuat sehingga tidak mudah diombang-ambingkan oleh keadaan dan pengaruh negatif.

Untuk meningkatkan daya saing, selain pembekalan kerja dan pengetahuan yang luas dan mendalam, perlu juga ditanamkan pengetahuan sejarah kebangsaan untuk menanamkan kebanggaan sebagai warga bangsa yang besar. Pendidikan kesenian yang menanamkan disiplin, percaya diri, semangat bersaing, dan mengejar keberhasilan dengan kreativitas pembaharuan, dengan penuh perhitungan melihat jauh ke depan. Peranan kesenian sebagai salah satu manifestasi dan ekspresi kebudayaan bangsa harus terus dipupuk sebagai sarana pembentukan kepribadian dan membangun memupuk kebanggaan terhadap kebudayaan bangsa yang mencerminkan kebersamaan bangsa dalam Bhinneka Tunggal Ika.

**BIODATA**

**PROF. DR. S. BUDHISANTOSA**

(Lahir di Garut, Jawa Barat, 27 Agustus 1937)

**PENDIDIKAN**

- Sarjana Antropologi Budaya, Universitas Indonesia, 1962
- Post Graduate Study (Ph.D candidate in Anthropology), Monash University, Australia, 1970
- Doktor Antropologi, Universitas Indonesia, 1977
- Post Doctoral – Senior Fellow at Communication and Population Institute, East West Center, Honolulu, Hawaii, 1979 - 1981

**SEBAGIAN PENGALAMAN KERJA**

- Ketua Jurusan Antropologi FIB dan FISIP-UI, 1977-1985
- Direktur Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1980-1993
- Staf Ahli Bidang Sosial Budaya Menteri Negara Lingkungan Hidup, 1993-1995
- Ketua Asosiasi Antropologi Indonesia (AAI), 1983-1993
- Ketua Umum Partai Demokrat Pertama, 1999-2005
- Anggota Dewan Pertimbangan Presiden 2005-2009
- Anggota Himpunan untuk Yayasan Ilmu-ilmu Sosial, sejak 1984
- Guru Besar Antropologi FISIP-UI
- Guru Besar Ketahanan Nasional dan Kebudayaan pada Program Pascasarjana Pengkajian Ketahanan Nasional, Universitas Indonesia
- Guru Besar tentang Kepustakaan Kajian Wanita pada Program Pascasarjana Kajian Wanita, Universitas Indonesia
- Guru Besar Ekologi Kebudayaan pada Program Pascasarjana Studi Lingkungan, Universitas Indonesia
- Guru Besar Antropologi Sosial Budaya pada Program Pascasarjana Arkeologi, Universitas Indonesia
- Anggota Tim Koordinator Peneliti/Pengkaji Kebudayaan Jawa
- Anggota Panitia Nasional untuk Persiapan Konferensi Internasional tentang Kependudukan, Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, 1984

### SEBAGIAN PENGALAMAN LAIN

#### Internasional:

- Post Graduate Study (Ph.D Candidate in Anthropology) pada Department Anthropology and Sociology Monash University, Australia, 1969-1971
- Pembicara pada Seminar On Rural Community Life in Indonesia di Canberra, Australia, 1973
- Pembicara pada Internasional Symposium on Culture Exchange in South Asia and Japan, di Tokyo, Jepang, 1976
- Pembicara pada Consultative Meeting On Traditional Cultural diselenggarakan oleh Japan Foundation di Bangkok, Thailand, 1976
- Pembicara pada International Seminar On Hired Labor in Agricultural Sector di Tokyo, Jepang, 1976

#### Seminar dan Kepanitiaan

- Panitia Pengarah dan Pemakalah pada Seminar Sejarah Nasional III di Jakarta, diselenggarakan oleh Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Direktorat Jarahnitra, Ditjenbud, 1981
- Penasihat Teknis dan Pemakalah Seminar Sejarah Lokal tahun 1982 di Denpasar, Bali, diselenggarakan oleh Proyek Inventarisasi Sejarah Nasional Direktorat Jarahnitra, Ditjenbud, 1982
- Panitia Pengarah dan Pemakalah pada Seminar Sejarah Perlawanan Rakyat Sulawesi Selatan di Ujung Pandang, diselenggarakan oleh Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Jarahnitra, 1983
- Pemakalah pada Seminar Kode Etik Produksi Film Nasional, diselenggarakan oleh Dewan Film Nasional, 1983
- Pemakalah pada Seminar Hari Jadi Kota Manado, diselenggarakan oleh Pemda Sulawesi Utara di Manado, 1982

#### Penelitian dan Penulisan Artikel

- Studi Komparatif mengenai masyarakat petani di Asia Tenggara dan Jepang, sponsor The Toyota Foundation
- Dampak Sosial dari Satelit Komunikasi terhadap Desa-desa di Indonesia, sponsor: LEKNAS-LIPI, Departemen Penerangan, dan The East West Communication Institute, East West Center
- Akulturasi dalam kontak kebudayaan di Lembah Baliem, Irian Jaya
- Pembangunan Siberut Bersama Masyarakat Siberut: Kehidupan Sosial Budaya dan Perekonomian Masyarakat Siberut
- Telah menulis setidaknya 325 artikel yang dipublikasikan dalam bahasa Indonesia dan Inggris mengenai antropologi ekonomi, kesenian, etnografi, kebudayaan, dan lingkungan

**Diselenggarakan oleh**



**Bekerjasama dengan**



**sebagai bagian dari acara reuni akbar  
"Homecoming 60 Tahun Antropologi Universitas Indonesia"**

**Didukung oleh**

